

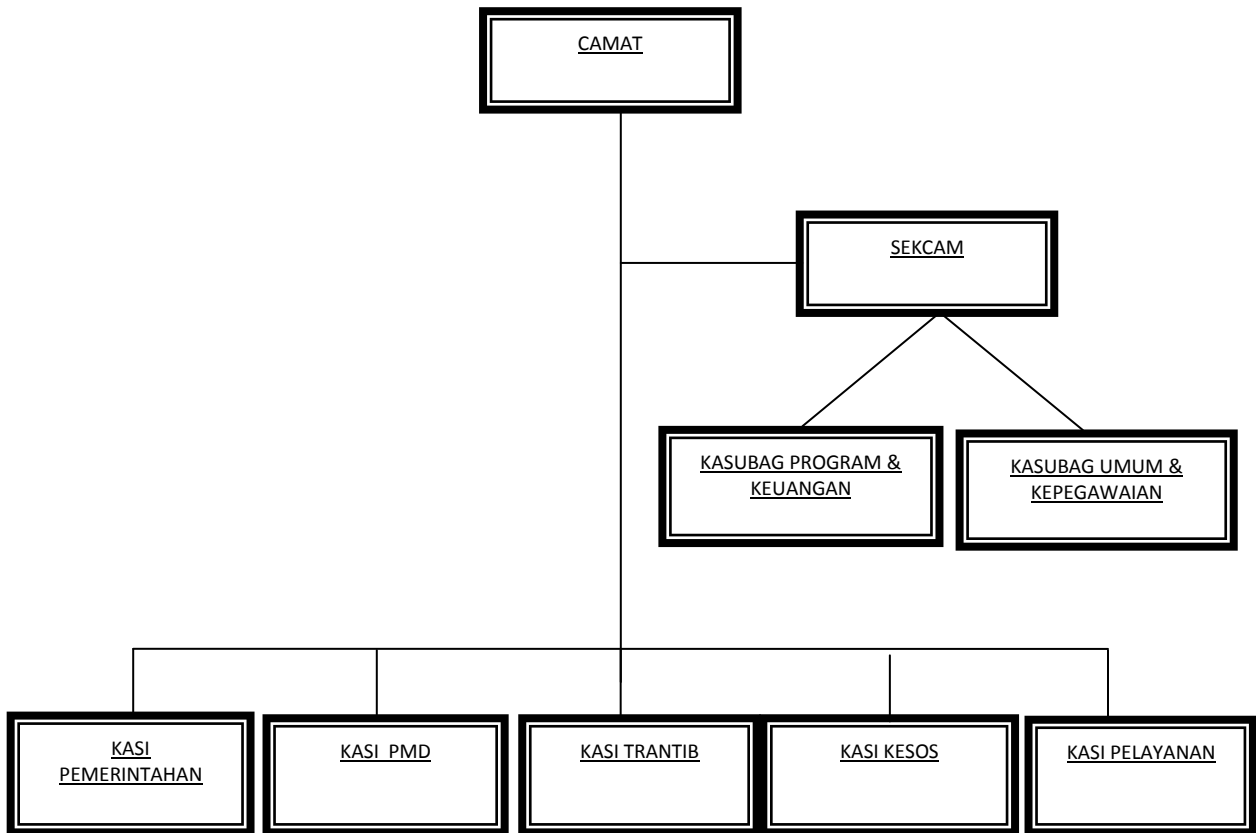
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Margorejo terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI



Gambar II.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan

		kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

		<ul style="list-style-type: none"> - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	--	--

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Margorejo berjumlah 24 orang, terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jml
		L	P	L	P	L	P	
1	Kecamatan Margorejo	2		3	4	3	5	17
2	Camat	1						1
3	Sekcam	1						1
4	Kasubag Program & Keuangan			1				1
5	Kasubag Umum & Kepegawaian				1			1
6	Kasi PMD			1				1
7	Kasi Trantib			1				1
8	Kasi Kesos				1			1

9	Kasi Pelayanan				1			1
10	Kasi Pemerintahan				1			1
11	Staf Pemerintahan					1		1
12	Staf subag Umum & Kepegawaian					1	1	2
13	Staf kasi Kesos						1	1
14	Staf Program & Keuangan						1	1
15	Staf kasi Pelayanan					1	1	2
16	Staf kasi PMD						1	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo 2017

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jum lah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kec Margorejo	-	-	6	3	-	1	6	7	1	1	12	12
2	Camat							1				1	
3	Sekcam							1				1	
4	Kasubag Program & Keu							1				1	
5	Kasubag Umum & Kepeg								1				1
6	Kasi PMD									1		1	
7	Kasi Trantib							1				1	
8	Kasi Kesos								1				1
9	Kasi Pelayanan								1				1
10	Kasi Pemerintahan										1		1
11	Staf Kasi Pemerintahan							1				1	
12	Staf Subbag Umkep			1	1							1	1
13	Staf Program & Keu								1				1
14	Staf Kasi Kesos				1								1
15	Staf Kasi Pelayanan			1	1							1	1
16	Staf Kasi PMD					1							1
17	Non PNS			3				1	3			4	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket
1	Gedung	4	unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruanga n	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	7	unit		
		4	unit	Baik	
		3	unit	Kurang Baik	
	Peralatan Kerja :				
5	Komputer Pc	2	unit	1 baik,1 kurang baik	
6	Laptop	4	unit	3 baik, 1 kurang baik	
7	Printer	5	unit	3 baik, 1 kurang baik, 1 rusak	
8	Meja	17	unit	13 baik, 4kurang baik	
9	Kursi	22	unit	20 baik, 2 kurang baik	
10	AC	5	unit	Cukup baik	
11	Almari	12	unit	3 baik, 9 kurang baik	
12	Filling cabinet	9	Unit	3 baik, 6 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 8 unit termasuk mobil maka

kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 2 unit dikarenakan 1 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 2 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 2 unit dengan kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 10 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 6 unit lagi untuk 8 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 1 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 17 unit dengan 13 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 22 unit dengan 20 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 4 unit lagi untuk ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 12 unit dengan 9 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 9 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 6 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak

5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Margorejo

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Margorejo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.181,37 Ha. Secara administratif Kecamatan Margorejo dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Tlogowungu & gembong Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kabupaten Kudus



Gambar II.2 Peta Kecamatan Margorejo

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Margorejo dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.7
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Margorejo

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Margorejo	490,08	28	7	Pertanian, industri, perdagangan
2	Sukobubuk	819,00	13	3	Pertanian, perkebunan
3	Sukokulon	268,01	12	3	Pertanian, perdagangan, industri
4	Banyu urip	395,00	8	2	Pertanian, industri kecil
5	Bumirejo	320,97	16	3	Pertanian, industri kecil
6	Langse	148,20	5	1	Pertanian, industri, perdagangan
7	Jambean Kidul	522,00	32	5	Pertanian, industri kecil,
8	Muktiharjo	329,00	39	6	Pertanian, industri, perdagangan
9	Sukoharjo	377,00	34	8	Pertanian, industri, perkebunan
10	Badegan	268,00	9	3	Pertanian, industri kecil
11	Dadirejo	227,04	16	3	Pertanian, industri kecil
12	Langenharjo	249,20	17	3	Pertanian, industri kecil,
13	Metaraman	211,80	8	2	Pertanian, industri kecil
14	Ngawen	233,00	10	2	Pertanian, industri kecil
15	Pegandan	588,98	22	3	Pertanian, perkebunan
16	Wangunrejo	318,48	12	2	Pertanian, industri kecil
17	Penambuhan	217,05	20	5	Pertanian, industri kecil
18	Jimbaran	198,56	17	2	Pertanian, industri kecil,

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam angka 2017

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Margorejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.445 jiwa, yang terdiri dari 29.550 jiwa laki-laki dan 31.895 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Margorejo tahun 2016 berjumlah 17.974 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan

pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 6,25 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Margorejo digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8
Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Margorejo

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.533	50,1	1.532	49,9	3.065	100
2	5-9	1.720	51.7	1.604	48.3	3.324	100
3	10-14	1.809	51.2	1.725	48.8	3.534	100
4	15-19	1.645	49.4	1.684	50.6	3.329	100
5	20-24	1.257	49.7	1.268	50.3	2.525	100
6	25-29	1.094	47.6	1.204	52.4	2.298	100
7.	30-34	1.246	46.5	1.434	53.5	2.680	100
8	35-39	1.529	46.8	1.740	53.2	3.269	100
9	40-44	1.707	47.8	1.864	52.2	3.571	100
10	45-49	1.719	48.2	1.850	51.8	3.569	100
11	50-54	1.582	50.3	1.563	49.7	3.145	100
12	55-59	1.345	51.2	1.242	48.8	2.587	100
13	60-64	982	49.3	1.008	50.7	1.9900	100
14	65-69	773	48.1	834	51.9	1.607	100
15	70-74	594	46.3	690	53.7	1.284	100
16	75+	653	41.8	910	58.2	1.563	100

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Margorejo sebagai berikut

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Margorejo

No	Pendidikan	L	%	P	%	jumlah	%
1	TK	5.254	47.8	5.734	52.1	10.988	18.34
2	SD/MI	6.345	50.6	6.180	49.3	12.525	20.91

3	SMP/MTs	4.249	49.3	4.364	50.6	8.613	14.38
4	SMA/SMK/MA	6.144	52.1	5.628	47.8	11.772	19.65
5	Perguruan Tinggi	1.221	50.2	1.208	48.7	2.429	4.05

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Margorejo sebagai berikut

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Margorejo

No	Jenis Pekerjaan	L	%	P	%	jumlah	%
1	Petani	2.701	54.6	2.244	45.3	4.945	8.25
2	Pengusaha	64	84.2	12	15.7	76	0.56
3	Pengrajin industri kecil	96	75.0	32	25.0	128	0.21
4	Buruh tani	1.120	71.6	443	28.3	1.563	2.61
5	Buruh industri	12	100	0	0	12	0.03
6	Buruh bangunan	329	99.6	1	0.03	330	0.55
7	Buruh pertambangan	21	100	0	0	21	0.06
8	Pedagang	374	32.3	781	67.6	1155	1.93
9	Pengangkutan	49	100	0	0	49	0.08
10	PNS	759	56.4	586	43.5	1.345	2.24
11	TNI/Polri	225	95.3	11	4.6	236	0.39
12	Pensiunan	340	73.1	125	26.8	465	0.78

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Margorejo sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Margorejo

No	Agama	L	%	P	%	jumlah	%
1	Islam	28.951	49.4	29.600	50.5	58.551	97.73
2	Kristen	488	47.5	539	52.4	1.027	1.71
3	Katolik	148	47.2	165	52.7	313	0.52
4	Hindu	7	87.5	1	12.4	8	0.01

5	Budha	2	66.6	1	33.3	3	0.01
6	Kepercayaan	56	0.09	54	0.08	110	0.17

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Margorejo didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Margorejo dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	1	3	1	4	3
2	Jumlah kasus Pembunuhan	0	2	0	1	0
3	Jumlah kejahatan seksual	6	5	4	9	6
4	Jumlah kasus	11	3	9	5	2

	penganiayaan					
5	Jumlah kasus pencurian	4	6	4	26	17
6	Jumlah kasus penipuan	4	5	1	1	9
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	0	0	2	1
8	Jumlah kriminal selama 1 th	27	24	19	48	38
9	Jumlah penduduk	59.275	59.542	60.330	62.448	66.026
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	4,55	4,03	3,14	7,68	5,75

Sumber :Data kepolisian sector Margorejo TA 2017

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Margorejo apat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Margorejo	11	1	12
2	Sukobubuk	3	1	4
3	Sukokulon	6	2	8
4	Banyu urep	5	4	9
5	Bumirejo	5	4	9
6	Langse	4	5	9
7	Jambean Kidul	7	6	13
8	muktiharjo	2	2	4
9	Sukoharjo	3	2	5
10	Badegan	4	2	6
11	Dadirejo	2	3	5
12	Langenharjo	2	2	4
13	Mataraman	6	4	10
14	Ngawen	7	4	11

15	Pegandan	12	2	14
16	Wangunrejo	7	1	8
17	Penambuhan	8	5	13
18	jimbaran	9	3	12
	Jumlah	113	52	165

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Margorejo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data anggota linmas II.13

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Margorejo	69	6	63
2	Sukobubuk	55	7	48
3	Sukokulon	41	2	39
4	Banyu urip	41	4	37
5	Bumirejo	55	4	51
6	Langse	41	3	38
7	Jambean Kidul	69	9	60
8	Muktiharjo	69	7	62
9	Sukoharjo	69	2	67
10	Badegan	41	2	39
11	Dadirejo	41	3	38
12	Langenharjo	55	1	54
13	Mataraman	41	4	37
14	Ngawen	41	5	36
15	pegandan	41	5	36
16	Wangunrejo	41	8	33
17	Penambuhan	55	2	53
18	Jimbaran	41	1	40
	Jumlah	932	69	863

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Margorejo periode 2012-2017 sebagai berikut.

Tabel II.14

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARGOREJO
KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,76	5,53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%		N/A		4,20	4,50	4,8	5,3	5,5	N/A	N/A	N/A	N/A	52	4,20	4,50	4,8	5,3	5,5
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		N/A		0,53	0,05	0,06	0,06	0,06	N/A	N/A	N/A	N/A	53	0,53	0,05	0,06	0,06	0,06
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		N/A		67	70	76	84	86	N/A	N/A	N/A	N/A	40	67	70	76	84	86

5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		N/A		100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		N/A		1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		N/A		100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	30	100	100	100	100	100
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		N/A		100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		N/A		100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	4	100	100	100	100	100
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		N/A		100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		N/A		100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		N/A		70	75	80	85	90	N/A	N/A	N/A	N/A	50	70	75	80	85	90
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		N/A		80	83	85	85	88	N/A	N/A	N/A	N/A	88	80	83	85	85	88

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Margorejo sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Margorejo sebagaimana tabel berikut.

Tabel T-C.24.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARGOREJO
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	55,000	49,000	61,000	43,000	24,500	52,440	45,600	56,000	39,000	21,840	-43.02	#VALUE!	-2.09	-1.24	1.49	1.66	-3.83
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11,400	11,800	15,200	0	7,450	9,660	9,660	13,176	0	5,380	#DIV/0!	#VALUE!	10.37	-3.47	#DIV/0!	8.07	-100.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	20,00 0	25,60 0	-	-	-	18,00 0	24,000	9.33	#DIV/0! !	#DIV/0! 0!	#DIV/0! /0!	#DIV/0! /0!	#DIV/0! /0!	#DIV/0! /0!
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	24,00 0	25,50 0	14,70 0	11,50 0	-	20,00 0	20,00 0	11,53 0	8,790	-5.44	#DIV/0! !	#DIV/0! 0!	-6.78	0.56	#DIV/0! /0!	- 12.86
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	9,600	9,800	14,50 0	14,00 0	15,30 0	7,200	7,200	12,25 0	11,03 0	12,145	1.86	#VALUE! E!	33.67	-0.21	- 2.93	14.21	11.25
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	13,50 0	17,80 0	13,00 0	18,70 0	-	11,03 6	15,00 0	10,40 0	16,757	7.31	#DIV/0! !	#DIV/0! 0!	-0.96	- 2.27	#DIV/0! /0!	-1.47
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	51,00 0	18,00 0	1,800	30,00 0	-	47,50 0	15,00 0	880	28,301	223.81	#DIV/0! !	#DIV/0! 0!	1.45	- 34.6 2	#DIV/0! /0!	- 63.11

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perijinan dan Pelayanan Publik																	
Program Non Urusan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,000	113,000	142,000	192,000	210,000	83,926	107,907	139,664	171,982	195,512	9.38	#VALUE!	1.09	0.90	0.39	13.58	12.36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	52,000	74,000	110,000	72,000	113,000	48,263	70,650	104,660	61,660	102,223	28.47	#VALUE!	1.14	-0.84	-1.90	21.35	-3.35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,400	11,000	13,000	14,000	10,400	5,580	7,920	8,750	10,000	8,000	-8.57	#VALUE!	0.34	0.79	-2.60	11.90	6.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8,000	-	15,600	11,000	10,600	6,500	-	13,200	8,385	8,040	-0.91	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.14	19.38	#DIV/0!
Program Peningkatan	-	-	6,000	1,600	1,700	-	-	4,000	1,080	1,392	1.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-0.39	#DIV/0!	#DIV/0!

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Margorejo

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Margorejo merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Margorejo kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datan (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.